



Sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Karang Taruna Desa Bolopleret, Dukuh Troditan Rw 01, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Jelita Ajeng Nur Sekar Jagat¹, Tsamrotul Husna², Mega Dwi Fitriani³,
Anavee Khoona⁴, Fajar Winagustyan Putri⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: jelitaajeng568@gmail.com, tsmrulhsnaa05@gmail.com,
megadwifitriani23@gmail.com, anawee9246@gmail.com, fajarwinaputri123@gmail.com

Abstract

Sexual violence is a social issue with a steadily rising number of cases in Indonesia; major contributing factors include a lack of public understanding regarding sex education and power imbalances stemming from patriarchal culture. This issue was identified among the youth members of the (Youth Organization) in Dukuh Troditan RW 01, Bolopleret Village, Juwiring District, Klaten Regency, who lacked awareness regarding sexual violence and the existence of the Women and Children Protection Agency (LPPA). This community service activity aimed to enhance the youth's understanding of sexual violence, patriarchal culture, and the role of the Women and Children Protection Agency (LPPA) as a resource for protection and reporting for victims of violence. The Participatory Action Research (PAR) method was employed, comprising stages of problem mapping, outreach/dissemination, and evaluation. The outreach session was held on Saturday, July 4, 2026, at 19:00 WIB, featuring Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum., a lecturer at the State Islamic University (UIN) Raden Mas Said Surakarta, who presented material on sexual violence and patriarchal culture in Indonesia. The results indicate that the session helped participants understand the forms of sexual violence, the impact of patriarchal culture, and the importance of the LPPA as a reference point for protection and reporting within the community. This activity is expected to foster a shift in the mindset and behavior of the youth in Dukuh Troditan RW 01 toward a more positive outlook and greater concern for issues regarding the protection of women and children.

Keywords: outreach, women and children protection agency, sexual violence, patriarchal culture, youth organization.

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan sosial yang jumlah kasusnya terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun, dan salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai edukasi seksual serta relasi kuasa yang timpang akibat budaya patriarki. Persoalan ini turut ditemukan pada kalangan muda-mudi Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, yang di samping minimnya pemahaman kekerasan seksual dan lembaga LPPA. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemuda-pemudi mengenai kekerasan seksual, budaya patriarki, serta keberadaan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) sebagai wadah perlindungan dan pelaporan bagi korban kekerasan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), meliputi tahap pemetaan masalah, sosialisasi, dan evaluasi. Sosialisasi dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 19.00 WIB dengan menghadirkan narasumber Ibu Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum., dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang menyampaikan materi mengenai kekerasan seksual dan budaya patriarki di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini membantu peserta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak budaya patriarki, serta pentingnya peran LPPA sebagai rujukan perlindungan dan pelaporan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku pemuda Dukuh Troditan RW 01 ke arah yang lebih positif dan peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.

Kata Kunci: sosialisasi, lembaga perlindungan perempuan dan anak, kekerasan seksual, budaya patriarki, karang taruna.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, meningkat sekitar 9,77 persen dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus (CNN Indonesia, 2025; Tirto.id, 2025). Dari sisi bentuknya, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dibandingkan kekerasan psikis, fisik, maupun ekonomi (CNN Indonesia, 2025), dan Catatan Tahunan 2025 Komnas Perempuan kembali menegaskan bahwa ruang personal dan relasi dekat di sekitar korban masih menjadi lokasi paling rentan terjadinya kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2026).

Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai edukasi seksual serta relasi kuasa yang timpang di antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki. Banyak masyarakat masih menganggap topik seksualitas sebagai hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga generasi muda tumbuh tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang batasan tubuh, hak atas diri sendiri, dan cara melindungi diri maupun orang lain di sekitarnya (Zakiyah, Prabandari, & Triratnawati, 2016). Padahal, ketika pemuda maupun masyarakat umum tidak memiliki pemahaman yang cukup, mereka menjadi lebih rentan menjadi pelaku, korban, maupun pihak yang membiarkan tindakan kekerasan seksual terjadi di lingkungannya (Wajdi & Arif, 2021).

Persoalan tersebut turut ditemukan di Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Berdasarkan observasi tim Kuliah Kerja Nyata (KKN), kalangan muda-mudi yang tergabung dalam Karang Taruna dusun ini masih memiliki kebiasaan budaya patriarki, yang berpotensi memicu perilaku berisiko, termasuk relasi yang tidak sehat antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, pemahaman pemuda-pemudi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak dari budaya patriarki, serta keberadaan lembaga yang dapat menjadi rujukan perlindungan dan pelaporan seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) masih tergolong minim. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang menasar langsung kelompok pemuda sebagai generasi yang berperan penting dalam membentuk budaya masyarakat yang lebih peduli dan tidak permisif terhadap kekerasan seksual.

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) merupakan wadah pelayanan, baik yang dikelola pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun organisasi masyarakat sipil, yang berfokus pada

perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah hukum, termasuk kekerasan seksual (Putri & Haryadi, 2025). Dasar hukum kelembagaan ini antara lain tertuang dalam UU TPKS Pasal 76 Ayat (3), yang mengamanatkan UPTD PPA untuk menyelenggarakan penanganan dan perlindungan korban, memfasilitasi layanan kesehatan, penguatan psikologis, serta layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024). Peran LPPA tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus yang telah terjadi, tetapi juga preventif melalui edukasi masyarakat, sehingga pengenalan lembaga ini kepada generasi muda menjadi langkah penting agar mereka mengetahui ke mana harus melapor maupun mencari perlindungan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan (Putri & Haryadi, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) pada Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret" dilaksanakan sebagai upaya membangun kesadaran dan pemahaman pemuda mengenai kekerasan seksual, budaya patriarki, serta pentingnya keberadaan LPPA sebagai rujukan perlindungan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan Karang Taruna mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampak budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkenalkan fungsi dan mekanisme pelaporan pada LPPA, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku pemuda ke arah yang lebih positif serta peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di lingkungannya.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan tim KKN secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang dilalui meliputi pemetaan masalah melalui observasi kondisi Dukuh Troditan RW 01, perencanaan kegiatan dan koordinasi dengan pengurus Karang Taruna, pelaksanaan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber ahli, sesi tanya jawab, hingga evaluasi kegiatan. Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak budaya patriarki dalam relasi sosial, serta pengenalan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) sebagai wadah perlindungan dan pelaporan. Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya secara langsung kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Masalah

Sebelum pelaksanaan program kerja, tim KKN terlebih dahulu melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh pemuda-pemudi di Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil observasi dan koordinasi dengan pengurus Karang Taruna setempat, ditemukan bahwa kalangan masih adanya budaya patriarki. Kebiasaan ini dinilai berpotensi memicu berbagai perilaku berisiko, termasuk relasi yang tidak baik dan minimnya kontrol diri dalam penyelesaian masalah.

Tim KKN juga menemukan bahwa pemahaman pemuda-pemudi mengenai kekerasan seksual dan budaya patriarki masih tergolong rendah. Banyak dari mereka belum memahami secara utuh bentuk-bentuk kekerasan seksual di luar kekerasan fisik, serta bagaimana budaya patriarki dapat mengganggu relasi kuasa yang timpang dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan mengenai keberadaan lembaga rujukan seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) pun masih minim, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan di lingkungan mereka, warga tidak mengetahui ke mana harus melapor maupun meminta pendampingan.

Berdasarkan temuan tersebut, tim KKN menetapkan Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01 sebagai sasaran utama program kerja sosialisasi, dengan pertimbangan bahwa pemuda merupakan kelompok usia yang rentan terpapar perilaku berisiko sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di lingkungan sosialnya. Melalui pemahaman yang memadai mengenai kekerasan seksual, budaya patriarki, dan keberadaan LPPA, diharapkan pemuda-pemudi Dukuh Troditan dapat lebih peduli dan proaktif dalam mencegah maupun merespons tindak kekerasan yang terjadi di sekitar mereka.

Sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) pada Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman pemuda-pemudi mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak adalah melalui program kerja sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA). Sosialisasi ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai kekerasan seksual, budaya patriarki, serta lembaga yang dapat menjadi rujukan perlindungan dan pelaporan. Pemilihan audiens Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01 didasarkan pada temuan pemetaan masalah bahwa kalangan pemuda-pemudi di dusun ini memerlukan penguatan pemahaman terkait isu tersebut,

sekalius berpotensi menjadi agen perubahan yang dapat menyebarluaskan kesadaran serupa kepada lingkungan sosialnya.

Tabel 1. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan budaya patriarki	Peserta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampak budaya patriarki dalam relasi sosial sehari-hari.
Pengenalan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA)	Peserta mengetahui fungsi, peran, dan mekanisme pelaporan pada LPPA sebagai wadah perlindungan korban kekerasan.
Sesi tanya jawab dan diskusi	Peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dengan sasaran peserta pemuda-pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna setempat. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Ibu Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum, dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang memaparkan materi mengenai kekerasan seksual dan budaya patriarki di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab yang salah satunya bersumber dari minimnya pemahaman dan relasi kuasa yang timpang akibat budaya patriarki (Zakiah, Prabandari, & Triratnawati, 2016), serta pentingnya peran generasi muda dalam mencegah dan merespons tindak kekerasan di lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber pada Sosialisasi LPPA

Selain membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual dan budaya patriarki, narasumber juga memperkenalkan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) sebagai wadah pelayanan yang dikelola pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun organisasi masyarakat sipil, yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah hukum, termasuk kekerasan seksual (Putri & Haryadi, 2025). Peserta diperkenalkan pada fungsi LPPA mulai dari asesmen awal, pendampingan pelaporan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga layanan non-litigasi seperti konseling dan rujukan psikologis, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS Pasal 76 Ayat (3) (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024). Pengenalan ini penting agar peserta mengetahui langkah konkret yang dapat diambil apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan di lingkungannya.

Sesi tanya jawab diadakan setelah penyampaian materi guna mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah dijelaskan. Peserta menyimak pemaparan narasumber dengan saksama dan turut berdiskusi mengenai pengalaman maupun pandangan mereka terkait relasi sosial di lingkungan sekitar.



Gambar 2. Sesi Foto Bersama Peserta Sosialisasi LPPA

Evaluasi dan Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, peserta yang terdiri dari pemuda-pemudi Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01 mengikuti rangkaian sosialisasi dengan cukup antusias, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab. Kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari menyesuaikan dengan waktu luang mayoritas

peserta yang berstatus pekerja maupun pelajar/mahasiswa, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anggota Karang Taruna.

Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan pemahaman peserta yang meningkat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak budaya patriarki, serta keberadaan dan fungsi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) sebagai rujukan perlindungan. Meskipun demikian, di kalangan pemuda memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali kegiatan sosialisasi, sehingga diperlukan tindak lanjut dari perangkat desa maupun organisasi kepemudaan setempat untuk menjaga keberlanjutan kesadaran yang telah dibangun.

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan ini, perlu dipertimbangkan pelibatan lebih lanjut antara Karang Taruna dengan LPPA atau UPTD PPA di tingkat kecamatan maupun kabupaten, misalnya melalui kunjungan lapangan atau kerja sama program kepemudaan yang mengintegrasikan isu pencegahan kekerasan seksual dan budaya patriarki secara berkelanjutan, sehingga pemahaman yang telah diperoleh tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi juga terwujud dalam perubahan sikap dan perilaku di kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) pada Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten merupakan salah satu upaya yang dapat membantu meningkatkan pemahaman pemuda-pemudi mengenai kekerasan seksual, budaya patriarki, serta pentingnya lembaga perlindungan sebagai rujukan pelaporan. Permasalahan yang ditemukan sebelum kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat minimnya pemahaman mengenai isu kekerasan seksual dan keberadaan LPPA.

Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 19.00 WIB dengan menghadirkan narasumber Ibu Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum., dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Slayyurakarta, yang menyampaikan materi mengenai kekerasan seksual dan budaya patriarki di Indonesia, dilanjutkan dengan pengenalan fungsi dan mekanisme pelaporan pada LPPA. Sesi tanya jawab yang diadakan setelah penyampaian materi menunjukkan bahwa peserta cukup antusias dan aktif berdiskusi mengenai isu yang dibahas.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda-pemudi Dukuh Troditan RW 01 mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan kesetaraan relasi sosial. Meskipun demikian,

diperlukan tindak lanjut dan pendampingan berkelanjutan, baik dari perangkat desa, organisasi Karang Taruna, maupun lembaga perlindungan terkait, agar pemahaman yang telah dibangun dapat terwujud dalam perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif di lingkungan Dukuh Troditan RW 01.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ahmad Indarta, M.E. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku narasumber yang telah bersedia memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih turut disampaikan kepada Pemerintah Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, serta pengurus dan anggota Karang Taruna Dukuh Troditan RW 01 yang telah memberikan izin, dukungan, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2025, 7 Maret). *Komnas Perempuan: Kekerasan perempuan meningkat 10 persen di 2024*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022, 12 Oktober). *Lindungi korban kekerasan seksual dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Komnas Perempuan. (2026, 6 Maret). *Siaran pers peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025: Memperkuat data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. Komnas Perempuan.
- Putri, W. A., & Haryadi, S. (2026). Implementasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2534>
- Tirto.id. (2025, 9 Maret). *Komnas Perempuan catat 445.502 kasus kekerasan pada 2024*. Tirto.id.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan menghindari pencegahan kekerasan maupun kejahatan seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>

Jelita Ajeng Nur Sekar Jagat et al. : Sosialisasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Karang Taruna Desa Bolopleret, Dukuh Troditan Rw 01, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Zakiyah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2016). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di Kota Dumai. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(9), 323–330. <https://doi.org/10.22146/bkm.10557>